

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Indonesia Negara Hukum”. Hal demikian berimplikasi pada harus terpenuhinya unsur *the “Rule Of Law”* setidaknya harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu : tegaknya supermasi hukum-*supermacy of law*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supermasi hukum berarti warga Negara diatur oleh hukum dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Menurut Dicey :<sup>1</sup>

Semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum Negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule Of Law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warga Negara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administrative

Untuk menegakan hukum Aparat penegak hukum harus selalu mengikuti perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Hal tersebut selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk -bentuk kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm.24.

tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa dilihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Macshstaat*) hal Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan

---

<sup>2</sup> Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 137.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 5

hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang dalam penanganannya juga harus di upayakan kekhususannya. Dalam hal keberhasilan pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu, yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut pertama, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

Untuk menegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi diperlukan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan diatur juga dalam UU. No. 30 Tahun 2002 yang mengatur hukum acara untuk penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Didalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya lembaga Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang berisi :

#### Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2007. hlm. 1.

b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. ud dalam Pasal 77 adalah praperadilan

#### Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

#### Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

#### Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

#### Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;

- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya
  - (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

### Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak
- (2) adanya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Tidak dapat dimintakan banding.

Lembaga praperadilan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti

permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>5</sup>

Praperadilan dibentuk untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.<sup>6</sup>

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 3.

Kemudian Mahkamah Konstitusi memperluas objek Praperadilan Penetapan tersangka masuk sebagai objek Praperadilan melalui dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Mahkamah Konstitusi KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahannya.

Kasus-kasus penetapan tersangka yang diajukan ke lembaga praperadilan telah memberikan format baru dalam dunia peradilan Indonesia. Hal ini dikarenakan diberikan perluasan terhadap objek praperadilan melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Perubahan itu berawal dari dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim Sarpin yang mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan Budi Gunawan dengan memperluas objek praperadilan yaitu penambahan penetapan tersangka sebagai objek peradilan.

Sebelumnya objek praperadilan terdiri dari sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Demikianlah ketentuan yang diatur dalam

Pasal 77 KUHAP. Permohonan praperadilan dapat dimohonkan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya bila dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan. Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan

Melihat kondisi diatas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.



Baru-baru ini yang menjadi sorotan publik adalah kasus Ketua DPR Setya Novanto. Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Setya Novanto ditetapkan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya Novanto diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017, pihak Setya Novanto merasa penetapan tersangka kepadanya tidak sah, KPK mengumumkan Novanto sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017. Sementara, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterima Novanto diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2017, Setya Novanto di tetapkan tersangka tidak melalui penyelidikan terlebih dahulu dan alat bukti yang di gunakan oleh KPK adalah alat bukti yang telah di gunakan pada perkara dengan tersangka yang berbeda, alasan – alasan tersebut diatas menyebabkan Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam gugatannya pihak Setya Novanto memohon agar hakim menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan NO.97/PID.PRAP/2013/PN.JKT.SEL memutuskan bahwa penetapan Tersangka Setya Novanto sebagai tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak sah serta sprindik Novanto sebagai tersangka yang dikeluarkan KPK tidak sah. Hakim menilai, KPK tidak menunjukkan proses penyelidikan terhadap Novanto. Selain itu, bukti yang diajukan bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan sendiri untuk perkara Novanto, tetapi dalam perkara lain. Hakim menilai, hal itu tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka dalam perundang-undangan maupun SOP KPK. Penetapan yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Akibat penetapan yang tidak sah, majelis hakim memutuskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Novanto dianggap tidak berlaku. Pengadilan memerintahkan KPK agar penyidikan terhadap Novanto dihentikan.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penulisan yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis dengan judul: “

**STUDI KASUS PERKARA NO.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL TENTANG  
PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

